



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetap Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
6. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

2. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 2

- (1) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dengan berdasarkan RPJM Nasional.
- (2) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berfungsi sebagai:
 - a. pedoman dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dan Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1887

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN
2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Hasil-hasil yang telah dicapai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama periode Tahun 2010-2014

a. Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan

Secara umum kinerja perekonomian selama periode Tahun 2010-2014 cukup baik. Dalam lima Tahun terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata 5,8% per-tahun. Secara fundamental, perekonomian nasional cukup kokoh menghadapi berbagai tekanan dari eksternal maupun internal. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 dan Tahun 2014 hanya mencapai 5,8% dan 5,0% melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 dan Tahun 2011 yang besarnya 6,3 % dan 6,5%.

b. Bidang Pangan dan Pertanian

Ketersediaan, ketercukupan, dan keterjangkauan pangan utama pada periode 2010-2014 secara nasional cukup stabil dan kondusif. Sektor Pertanian tumbuh rata-rata 4,18% per-tahun dan memberikan share sebesar 13,38% dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014. Share terbesar sektor pertanian terhadap PDB adalah subsektor tanaman perkebunan (3,77%), disusul tanaman pangan (3,26%), perikanan (2,34%) hortikultura (1,51%), peternakan (1,58%) dan kehutanan (0,71%).

Produksi padi Tahun 2014 mencapai 70,61 juta ton, dan stok beras sampai dengan akhir 2014 sebesar 1,79 juta ton. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, sejak Tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan harga pokok pembelian (HPP), dengan mengeluarkan Instruksi Presiden.

Petani sebagai ujung tombak dalam menghasilkan sumber pangan, maka sebagai upaya dalam menaikan taraf hidup petani sampai dengan 2014 hasilnya cukup positif, seperti terlihat dari Nilai Tukar

Petani (NTP) Tahun 2014 (rata-rata Januari-Desember) yaitu sebesar 102,03. Tingkat inflasi pangan Tahun 2014 khususnya *volatile food* sebesar 8,36%, sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2013 (8,38%).

c. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam

Kebutuhan sumber daya alam energi sampai saat ini terus meningkat sebesar 7% per-tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah dan pendapatan penduduk. Pada Tahun 2013, produksi minyak bumi mencapai 824 Setara Barel Minyak (SBM). Ketergantungan penyediaan energi masih bertumpu pada minyak bumi dan masih memberi kontribusi sebesar 49,7% dari total kebutuhan, sedangkan energi baru dan terbarukan sebesar 5,7%. Sementara kontribusi penerimaan minyak dan gas bumi terhadap PDB rata-rata sebesar 7,8% pada periode Tahun 2010-2013. Sementara untuk memenuhi ketersediaan listrik dalam kurun lima Tahun terakhir telah dilakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik lebih kurang sebesar 17 Giga Watt (GW), sehingga kapasitas pembangkit listrik nasional sampai akhir Tahun 2014 diperkirakan akan mencapai sekitar 50,7 GW.

Dalam kurun waktu Tahun 2010 – 2013, peranan sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan sebesar 2,1% per-tahun. Adanya larangan ekspor bahan galian mentah mulai tanggal 12 Januari 2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka setiap perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hal ini diharapkan meningkatkan industri berbasis mineral logam, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam rangka perbaikan tata kelola minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara dilakukan sosialisasi kebijakan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) kepada para pemangku kepentingan yang terdiri atas Badan Ushaha Mili, Swasta (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang merupakan perusahaan mineral dan batubara serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas/KKKS dan Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun daerah terutama untuk memberikan pemahaman mengenai arti pentingnya transparansi penerimaan negara, penerimaan daerah, yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif.

d. Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, serta Ketenagakerjaan

Dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional yang telah dikoordinasikan

oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Kementerian/Lembaga terkait, dan asosiasi, pelaku usaha industri kreatif.

Sementara itu dalam mendukung pengembangan wirausaha telah dilakukan 3 (tiga) tahapan terintegrasi dalam pengembangan kewirausahaan 1) pembibitan wirausaha (perubahan pola pikir dan change management), 2) penempaan wirausaha melalui kompetisi bisnis plan dan pelatihan kewirausahaan, 3) pengembangan wirausaha melalui kemitraan, kolaborasi, pendampingan, penguatan kelembagaan inkubator bisnis baik di Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi dan industri dalam rangka peningkatan jumlah wirausaha muda berdaya saing dan inovatif, Selain itu, telah dilakukan juga beberapa hal lainnya seperti: 1) koordinasi rancangan *roadmap* pengembangan inkubator wirausaha, 2) koordinasi kurikulum *technopreneur* yang telah diterapkan pada universitas, dan 3) koordinasi inkubasi wirausaha ekonomi kreatif yang akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan *Jebel Ali Free Zone Area (JAFZA)*.

Capaian dalam rangka mendorong pengembangan UMKM diantaranya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Untuk menghadapi persaingan tenaga kerja pada saat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah dillaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan optimalisasi BLK dan UPT bersinergi dengan pusat-pusat pelatihan swasta untuk mewujudkan *skilled labor* ketenagakerjaan Indonesia dan langkah-langkah penyiapan *roadmap* tenaga kerja nasional dan *grand strategy* ketenagakerjaan nasional dalam mendukung pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada Tahun 2015.

e. Bidang Perniagaan dan Industri

Dalam upaya mendorong pengembangan dan perbaikan iklim investasi di Indonesia salah satunya adalah dengan mendorong kemudahan berusaha di bidang investasi. Hal ini didukung dengan upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan pelaksanaan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai dasar hukum pembentukan kelembagaan PTSP baik di Pusat maupun Daerah. Dari Tahun 2009 hingga Tahun 2014 pembentukan PTSP di 561 seluruh wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang telah mencapai 493 PTSP, dan pada Tahun 2015 akan terbentuk seluruhnya.

Terkait dengan penerapan *Indonesia National Single Window* (INSW), beberapa hasil program kerja, antara lain: telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window*, yang memungkinkan layanan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan telah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan melibatkan 15 (lima belas) kementerian/lembaga atau lebih dari 18 (delapan belas) instansi penerbit perijinan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepabeanan dan kepelabuhan serta pengawasan di bidang Peraturan Daerahgangan. Pengembangan industri manufaktur dilakukan melalui upaya penguatan struktur industri dan penyebaran industri ke luar Pulau Jawa. Adapun capaian di bidang industri manufaktur, yaitu: (1) Telah dilakukan percepatan pengembangan industri petrokimia yang meliputi pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, dan revitalisasi industri pupuk; (2) Telah tersusunnya *tailor-made policy* untuk dapat mendorong pengembangan industri baja nasional; (3) Telah dilakukan upaya pengembangan kawasan industri di 14 kawasan di luar Pulau Jawa. Akan tetapi, terkait hal ini masih terdapat beberapa kendala dalam aspek lahan, infrastruktur, perizinan, dan aspek teknis.

Koordinasi pengembangan kawasan ekonomi diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kawasan strategis ekonomi yang fungsional, tertib ruang dan berkelanjutan. Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi media yang memberikan alternatif penyelesaian permasalahan/konflik pengembangan kawasan ekonomi. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain: (1) Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden sebagai revisi atas Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, (2) Dukungan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Peraturan Daerahgangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, (3) Dukungan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Peraturan Daerahgangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan (4) Dukungan rumusan kebijakan dan implementasi kerjasama pengembangan kawasan industri terpadu Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah selama 5 Tahun terakhir diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada bidang infrastruktur sumber daya air hasil yang telah dicapai antara lain penyediaan akses layanan air minum layak sebesar 67%;

penetapan beberapa peraturan perundangan antara lain Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air dan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta dibangunnya beberapa bendungan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan lainnya.

Pada bidang transportasi, untuk penguatan sistem konektivitas dan logistik di luar Jawa telah dibangun infrastruktur jaringan jalan/jalan tol, kereta api, bandara dan pelabuhan. Beberapa contoh infrastruktur yang telah dan sedang dibangun antara lain: Jalan Tol Trans Sumatera; Bandara International Kualanamu; Jalur Rel Ganda (*Double Track*) Medan – Bandara Kualanamu; Pelabuhan International Kuala Tanjung; Pelabuhan Tanjung Apiapi, Sumatera Selatan; Pelabuhan Tanjung Sauh Batam; Jalur KA Batubara dan Terminal Terintegrasi di Sumatera Selatan; Jembatan Laut Penyeberangan Merak – Bakauheuni; Jalan Trans Kalimantan; Pelabuhan International Maloy, Kaltim; Bandara International Sepinggan; 3 Bandara di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur; Pelabuhan Makassar *New Port*; Jalan *By Pass* Palu-Parigi; Pelabuhan Hub International Bitung; Jalan Tol Manado-Bitung; Jalan KA Makassar – Parepare; Bandara International Lombok (BIL); *Coastal ShiPeraturan Pemerintah* lintas Jawa-Bali-Nusa Tenggara; Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Bali; Jalan Strategis Nasional Trans Papua (Jalan P4B) dan Trans Maluku; Pelabuhan Sorong di Seget; serta beberapa pelabuhan dan bandara di Papua dan Kepulauan Maluku.

Pada bidang penataan ruang telah dihasilkan percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kota/Kabupaten dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Kota. Dengan demikian hingga saat ini telah ditetapkan sejumlah 27 Peraturan Daerah RTRW Provinsi (79.41%), 327 Peraturan Daerah RTRW Kabupaten (82.16%), dan 82 Peraturan Daerah RTRW Kota (88.17%). Sedangkan untuk Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan telah ditetapkan 4 Peraturan Presiden dan untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) telah ditetapkan 7 Peraturan Presiden dari 76 KSN yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Hasil penting lainnya guna mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur adalah Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada Tahun 2011 yang telah dapat merealisasikan proyek sebesar Rp838,9 Triliun baik untuk sektor infrastruktur maupun riil yang tersebar di seluruh koridor Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku serta upaya untuk merevitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Komite ini diharapkan

ke depan akan mampu menjadi *delivery unit* di bidang infrastruktur yang akan terlibat sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas.

Pada bidang Telematika telah dihasilkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita lebar Indonesia, yang menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan di sektor Telematika yang meliputi empat pilar utama, yaitu aspek Regulasi, Legislasi dan Kelembagaan, aspek Pendanaan, aspek prasarana dan keamanan, serta aspek adopsi dan utilisasi kreatif. Pemerataan akses telekomunikasi pun semakin membaik ditunjukkan dengan meningkatnya daerah yang terakses layanan telekomunikasi seperti desa dering sebanyak 33.185 desa, desa pintar atau desa punya internet berjumlah 1.330 desa.

Sementara pada bidang Utilitas telah dihasilkan Kajian untuk percepatan implementasi Kebijakan *Sanitary Landfill*, penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

g. Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional

Di akhir Tahun 2015, Indonesia akan memasuki *ASEAN Economic Community* (AEC), yang akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Untuk mendorong komitmen Indonesia dalam AEC 2015 beberapa upaya telah dilakukan yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi nasional dan melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hasil-hasil yang telah dicapai berupa ratifikasi perjanjian dalam bentuk Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri serta sosialisasi AEC ke daerah guna memberikan pemahaman dan mengidentifikasi kesiapan tiap daerah dalam rangka menghadapi AEC.

Sebagai persiapan menghadapi AEC 2015, Indonesia telah menyusun *Policy Paper* tentang kesiapan Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing nasional. *Policy paper* tersebut antara lain berisi uraian mengenai peluang dan tantangan serta identifikasi masalah yang ada utamanya terkait dengan hal peningkatan daya saing nasional.

Indonesia juga telah memperkuat kerjasama ekonomi internasional meliputi, kerjasama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral. Pencapaian dari kerjasama ekonomi bilateral Asia ditunjukkan dengan selesainya pembangunan peleburan baja Krakatau-POSCO tahap pertama dan pembangunan pabrik ban Hankook Tire di Cikarang serta pembangunan *flagship project* yaitu: 1) Jakarta Mass Rapid Transit (MRT); 2) Perluasan dan pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta; 3) Pembangunan New Academic Research Cluster; dan 4) Pembangunan sewerage system di DKI Jakarta.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Tantangan dan peluang perekonomian Indonesia lima tahun ke depan, banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia yang kemungkinan pertumbuhannya moderat. Selain pertumbuhannya yang tidak tinggi, episentrum kegiatan ekonomi dunia diperkirakan akan bergerak dari Benua Eropa dan Amerika ke Asia Pasifik. Di tahun-tahun yang akan datang komoditas yang diperdagangkan sudah tidak lagi hanya diramaikan oleh barang, tetapi juga jasa. Aliran modal ke negara berkembang diperkirakan akan terus berlanjut meningkat, seiring dengan dibukanya pasar yang lebih luas dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Asia Pasifik. Di ASEAN sendiri, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai tanggal 31 Desember 2015.

Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global yang mementingkan besarnya pasar, membuat banyak Peraturan Daerahgangan, investasi, dan industri bergerak ke Negara berkembang dengan pasar domestik besar seperti, India, Brazil, dan Indonesia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Negara-negara berkembang terhadap PDB dunia diperkirakan akan tumbuh signifikan dari 34% di Tahun 2010 menjadi 43,8 % di akhir Tahun 2019.

Untuk kondisi dalam negeri, di Tahun pertama Kabinet Kerja, indikator-indikator ekonomi makro masih banyak dipengaruhi oleh perubahan dan penyesuaian faktor non-ekonomi. Untuk lima Tahun ke depan indikator ekonomi diprediksi akan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sasaran Ekonomi Nasional RPJMN 2015-2019 dan APBNP 2015

Indikator Makro Ekonomi	Baseline 2014	APBNP 2015	Sasaran 2019
• Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,7	8,0
• PDB per Kapita	43.403	47.804	72.217
(ribu Rp) Tahun Dasar 2010 Tahun Dasar 2000	41.163		
• Inflasi (%)	8,4	5,0	3,5
• Cadangan Devisa (US\$ Miliar)	111,8	119,9	N.A
• Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.878	12.500	N.A
• Rasio Penerimaan Pajak/PDB (%) Tahun Dasar 2010	11,5***	13,2*	16
• Tingkat Kemiskinan (%)	10,96**	10,3	7,0 - 8,0
• Tingkat Pengangguran (%)	5,94	5,6	4,0 - 5,0

*) Untuk Tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah

**) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

***Termasuk pajak daerah sebesar satu % PDB

Tabel 1.2

Sasaran Pokok Pembangunan Ekonomi RPJMN 2015-2019

Indikator	Baseline 2014	Sasaran 2019
▪ Kedaulatan Pangan		
• Padi (Juta Ton)	70,6	82,0
• Daging Sapi (Ribu Ton)	452,7	755,1
• Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi airpermukaan, air tanah dan rawa (Juta Ha)	8,9	9,89
• Pembangunan waduk	21	49
▪ Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		
• Akses Air Minum Layak (%)	70	100
• Kondisi mantap jalan nasional (%)	94	98
• Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 Tahun)	1.202 km	2.650 km
• Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 Tahun)	807 km	1.000 km
• Pengembangan pelabuhan	278	450

Sumber: Buku I RPJMN 2015-2019

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, penyusunan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian, maka pokok rencana kerja Kementerian diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional yakni 1. menstabilkan situasi ekonomi makro dan memperkuat struktur ekonomi. 2. realokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang lebih produktif, di bidang ekonomi terutama percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan pembangunan industri, 3. meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan kepercayaan investor, serta 4. meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan tantangan di bidang perekonomian yang dihadapi Indonesia pada masa mendatang semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan dan tantangan tersebut, jika tidak direspon secara tepat dan cepat dikhawatirkan berdampak pada tidak sehatnya kondisi perekonomian nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dinamika perubahan lingkungan strategis baik dari dalam negeri maupun luar negeri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa potensi dan permasalahan perekonomian yang memerlukan fokus koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Dalam RPJMN 2015-2019, target pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 sebesar 5,8%, 7,1% di Tahun 2017, dan 8,0% di Tahun 2019. Mengingat pencapaian Tahun 2014 sebesar 5,1%, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% pada Tahun 2017 merupakan

target yang tinggi dengan waktu yang singkat. Selain tantangan dari luar seperti masih rendahnya kinerja ekspor sejalan dengan lemahnya permintaan dunia, juga diperlukan satu sinergisitas antara pemangku kepentingan dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Diperlukan upaya, kerja keras dan dukungan dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu memperkuat kapasitasnya selaku lembaga koordinator dan pengendalian untuk meminimalkan ketidaksesuaian /inkonsistensi antara rencana dengan implementasi program/kegiatan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian dan ketidaksesuaian antar sektor serta pemerintah pusat dan daerah.

b. Ekonomi Makro dan Keuangan

Potensi dan permasalahan eksternal maupun internal yang akan dihadapi pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan perkembangan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan.
- Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut.
- Peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang saling tumpang tindih dan kontradiksi telah menjadi kendala untuk mendorong perekonomian.
- Kapasitas SDM Indonesia masih terbatas, ditandai dengan tingkat pendidikan pada pekerja Indonesia juga produktivitasnya.
- Penerapan dan penguasaan teknologi masih terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
- Kemampuan pembiayaan pembangunan terbatas. Oleh karena itu, penggalian sumber-sumber penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi.

c. Non Tariff Barrier dan Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Untuk melindungi pasar domestiknya sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi beberapa Tahun lalu, sebagian negara tujuan ekspor masih akan menerapkan hambatan Peraturan Daerahgangan berupa *non tariff barriers (NTBs.)* dihubung-hubungkan dengan masalah kesehatan, lingkungan, sanitasi dan sebagainya. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus tantangan untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi berbagai persyaratan sebagai upaya meningkatkan kinerja ekspor.

MEA 2015, merupakan komitmen bersama untuk menjadikan ASEAN sebagai: 1) pasar tunggal dan basis produksi; 2) kawasan berdaya

saing tinggi; 3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan 4) integrasi kedalam perekonomian dunia. Selain peluang besar dalam dunia usaha dengan diberlakukannya MEA, terdapat permasalahan dimana negara-negara ASEAN masih memberlakukan aturan/kebijakan *non tariff barriers* yang menghambat ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia menjelang pelaksanaan MEA 2015. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kalangan dunia usaha agar mendapatkan manfaat dari MEA.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Nasional mempunyai peranan besar dalam persiapan menghadapi implementasi dan memperoleh keutungan dari implementasi MEA. Sosialisasi dan edukasi tentang peluang MEA, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja menjadi aset untuk meraih keberhasilan MEA 2015.

d. Mengembangkan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Pengembangan maritim dan kelautan dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi maritim dan sinergisitas pembangunan kelautan nasional yang tersebar di berbagai K/L dan Daerah. Potensi sumber daya kelautan yang besar menjadikan peluang semakin meningkatnya kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan nelayan. Dalam rangka meningkatkan konektivitas laut dan sistem logistik diwujudkan dengan pengembangan Tol Laut, melalui peningkatan pelayaran angkutan perintis, pengembangan 24 pelabuhan dan 60 dermaga penyeberangan, dan peningkatan kemampuan industri maritim dan perkapalan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan koordinasi antar sektor dan lembaga dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan.

e. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kewirausahaan

Kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pelaku ekonomi adalah modal utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu kuantitas dan kualitas SDM pelaku ekonomi perlu terus selalu ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Tantangan ke depan adalah menyediakan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri dan menenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, seperti misalnya sarjana logistik, ahli pranata pelabuhan, negosiator, dan ahli manajemen resiko. Selain itu juga harus didorong kemampuan dan kapasitas wirausaha pelaku ekonomi Indonesia. Dalam rangka berkompetensi dengan tenaga

kerja di pasar ASEAN maupun internasional, perlu juga didorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing.

f. Pembiayaan Pembangunan

Salah satu permasalahan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan, khususnya infrastruktur adalah keterbatasan pendanaan/anggaran. Keterbatasan tersedianya infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama dalam peningkatan investasi dan penyebab mahalnya biaya logistik. Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Untuk mengatasinya diperlukan upaya-upaya peningkatan penerimaan/pendapatan dan peningkatan kualitas belanja negara. Optimalisasi ruang fiskal dalam kualitas belanja negara terutama pada pengendalian subsidi energi dan perbaikan belanja aparatur. Dari sisi penerimaan negara, salah satu yang dihadapi adalah masih rendahnya *tax coverage ratio* sehingga realisasi penerimaan masih dibawah potensinya. Peningkatan penerimaan negara, terutama peningkatan penerimaan perpajakan, dapat dilakukan melalui penguatan SDM dan kelembagaan perpajakan dan kepabeanan, perbaikan administrasi perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak, dan penegakan hukum guna menjamin ketataan pembayaran pajak. Selain optimalisasi sektor perpajakan, optimalisasi pembiayaan pembangunan diperoleh dari pemanfaatan pinjaman luar negeri yang selektif, pemanfaatan pembiayaan dalam negeri, seperti Surat Berharga Negara/Surat Berharga Syariah, serta pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah Swasta/*Public Private Partnership* (KPS/PPP).

g. Pangan dan Pertanian

Pembangunan pangan dan pertanian, menghadapi tantangan utama konversi lahan pertanian terutama di Jawa, Madura dan Bali terus meningkat. Untuk itu, sistem pertanian skala luas (*food estate*) harus dapat segera direalisasikan, dan dibuka kepada dunia usaha baik nasional, swasta maupun asing, namun dengan porsi dan pengaturan yang adil.

Ketersediaan pangan, melalui peningkatan produksi pangan, sangat penting bagi tercapainya stabilitas harga pangan dan inflasi. Mengingat komponen komoditi pangan memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan IHK.

Selanjutnya, subsidi pertanian, baik subsidi harga, subsidi bunga maupun subsidi-subsidi lainnya termasuk pupuk dan benih, masih terus diperlukan. Namun perlu dievaluasi kembali dalam pengelolaannya agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat penggunaan. Di bidang pembiayaan, perlu disusun *grand design* skim kredit program pertanian yang mudah diakses oleh petani.

Di bidang pemberian, perlu pengembangan pusat-pusat perbenihan di tingkat petani maupun perusahaan perbenihan yang memenuhi

standard kualitas perbenihan nasional maupun global. Pembangunan pertanian juga sangat penting bagi upaya pengurangan kemiskinan di daerah perdesaan yang sebagian besar mengandalkan sumber pendapatannya dari pertanian. Selain tantangan di dalam negeri juga tantangan produk pangan dan pertanian dari luar negeri dengan diberlakukannya MEA 2015.

h. Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Permasalahan disektor energi adalah terbatasnya pasokan energi primer dalam 5 tahun kedepan, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dari kemampuan pasokan yang ada, termasuk optimalisasi penggunaan gas dan batubara serta meningkatkan kontribusi sumber energi baru dan terbarukan Termasuk Bahan Bakar Nabati (BBN) dan panas bumi. Selain itu dari sisi pemanfaatannya perlu terus meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Permasalahan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi untuk pembangunan adalah peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan pengelolaan secara berkelanjutan. Ketergantungan terhadap minyak bumi perlu dikurangi sehingga bauran energi menjadi lebih sehat dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dan mengoptimalkan pemanfaatan gas alam. Konsumsi energi juga perlu dikelola dengan baik sehingga pemborosan serta jumlah emisi dapat dikurangi.

Permasalahan di sektor kehutanan terutama adalah tata kelola hutan yang belum efektif dan efisien dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Diversifikasi produk diperlukan sehingga sumber daya hutan dapat dioptimalkan sebagai penyedia bio energi untuk mendukung penyediaan energi terbarukan, pangan untuk mendukung ketahanan pangan, tanaman biofarma untuk mendukung pengembangan industri obat-obatan, serta serat sebagai bahan baku industri biotekstil dan bioplastik. Ketidakhadiran pengelola/KPH ditingkat tapak menyebabkan sejumlah permasalahan yang tidak dapat segera ditangani, seperti *illegal activities (logging, hunting, encroaching)*, pencurian plasma nutfah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan.

Permasalahan yang dihadapi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) antara lain adalah: (1) ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi, (2) pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal, (3) luas hutan dan lahan kritis yang masih tinggi dan laju deforestasi yang masih relatif tinggi,(4) kualitas lingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal, (5) pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal, dan (6) dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Perubahan iklim yang berjalan lebih cepat dari dekade

sebelumnya, disebabkan meningkatnya percepatan penumpukan terutama CO² di atmosfer bumi akibat pembakaran energi fossil, deforestasi atau kerusakan hutan, serta proses industri, yang menimbulkan efek gas rumah kaca. Beberapa kajian menunjukkan terjadinya bencana alam kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim, sehingga memberi dampak terhadap berbagai sektor di Indonesia, seperti kesehatan, pertanian, dan perekonomian nasional.

i. Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya saing KUKM dan Ketenagakerjaan/Buruh

• **Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Industri yang menggerakan ekonomi kreatif disebut industri kreatif, yang terdiri dari 15 kelompok industri inti, yaitu : (1) arsitektur; (2) desain; (3) film, video, dan fotografi; (4) kuliner; (5) kerajinan; (6) mode; (7) musik; (8) penerbitan dan percetakan; (9) permainan interaktif; (10) periklanan; (11) penelitian dan pengembangan; (12) seni rupa; (13) seni pertunjukan; (14) layanan komputer dan piranti lunak; dan (15) televisi dan radio. Pada Tahun 2013, kontribusi industri kreatif terhadap PDB nasional sebesar 7,05 % (Rp. 641,81 triliun), atau peringkat ke 7 dari 10 sektor kontributor PDB nasional. 5 (lima) kelompok industri yang menjadi penyumbang PDB industri kreatif terbesar yaitu : (1) Kuliner (32,51%); (2) Mode (28,29%); (3) Kerajinan (14,44%); (4) Penerbitan dan percetakan (8,11%); dan Desain (3,90%). Terdapat 5,4 juta usaha kreatif yang menyerap 11,8 juta tenaga kerja. Industri kreatif juga mampu menyumbangkan devisa negara melalui ekspor sebesar US\$ 3,2 miliar. Mengacu kepada RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan ekonomi kreatif pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN		Baseline	2019
1	Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	7,1%	12%
2	Tenaga Kerja (juta orang)	12	13
3	Kontribusi Ekspor/Devisa Bruto	5,8%	10,0%

Dalam penyelenggaraan MEA 2015, perlu dilakukan peningkatan daya saing sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan serta profesional dunia usaha di sektor ekonomi kreatif, khususnya pada sektor-sektor jasa yang terkait dengan 8 (delapan) *Multi Recognize Arrangement* (MRA).

Terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif ke depan, yaitu : (1) penyediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang profesional dan kompetitif; (2) penyediaan sumber daya pendukung yang berkualitas, beragam dan kompetitif; (3) penguatan struktur industri yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam; (4) penyediaan pembiayaan yang sesuai dan kompetitif; (5) perluasan pasar bagi karya kreatif; (6) penyediaan infrastruktur teknologi yang sesuai dan kompetitif; dan (7) penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi faktor rendahnya daya saing ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global saat ini.

- **Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Pada Tahun 2013, jumlah UMKM sebanyak 57,90 juta, atau 99,99 % dari jumlah usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 114,14 juta (97 %). Kontribusi UMKM terhadap PDB dan ekspor masih lebih kecil dibandingkan usaha skala besar yang jumlah unit usahanya jauh lebih sedikit, yaitu sebesar 59 % terhadap PDB dan 14,06 % terhadap ekspor. Sementara jumlah koperasi per-tahun 2014 sebanyak 209.488 unit usaha, sekitar 70 % diantaranya koperasi aktif, dengan jumlah anggota sebanyak 36.44 juta orang.

Sasaran peningkatan kewirausahaan, daya saing koperasi dan UMKM dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN		SASARAN 2015-2019
1	Rata-rata pertumbuhan nilai PDB UMKM dan Koperasi	6,5-7,5% per-tahun
2	Rata-rata pertumbuhan produktivitas UMKM	5,0-7,0 % per-tahun
3	Pertambahan jumlah wirausaha baru	1 juta unit (kumulatif 5 Tahun)
4	Peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan	55,0% (Tahun 2019)
5	Rata-rata pertumbuhan volume usaha koperasi	15,5-18,0

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro informal dengan aset dan

produktivitas yang rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor pertanian dan Peraturan Daerahgangan. Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Sementara, koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kondisi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya : (1) keterbatasan kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis produksi; (2) keterbatasan akses ke pembiayaan; dan (3) keterbatasan kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

- **Ketenagakerjaan/Buruh**

Investasi PMDN dan PMA semakin meningkat di Indonesia sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, ketenagakerjaan Indonesia (terampil, *middle skill*, dan *high skill*) berpotensi cukup besar dan menjanjikan untuk berperan serta dan terlibat di dalam proses industri. Ketenagakerjaan Indonesia dari sisi upah berdaya saing dibandingkan dengan tenaga kerja asing (khususnya ASEAN) yang tingkat upahnya tinggi. Namun di sisi lain tingkat kompetensi masih relative rendah. Oleh sebab itu, perlu segera dilakukan evaluasi dan peningkatan optimalisasi pusat-pusat pelatihan pemerintah dan dunia usaha/industri.

Posisi penyerapan ketenagakerjaan pada Tahun 2013-2014 terjadi penurunan diakibatkan oleh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dari 6,3% (semester I dan semester II Tahun 2013) menjadi 6% pada semester III dan semester IV Tahun 2013. Penurunan pertumbuhan ekonomi masih berlanjut sampai dengan akhir Tahun 2014 menjadi 5,2% sampai 5,3% (diatas ekspektasi). Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut secara otomatis terjadi penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja Tahun 2013-2014 yaitu dari 1 juta netto tenaga kerja baru menjadi ±400 ribu tenaga kerja netto. Permasalahan tersebut disamping diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi diatas ekspektasi juga disebabkan : (1) Tidak

optimalnya pusat-pusat pelatihan pemerintah (Balai Besar Latihan Kerja/BBLK, Balai Latihan Kerja/BLK, dan Unit Pelaksana Teknis/UPT) yang tidak bersinergitas dengan pusat-pusat pelatihan swasta/industri padat karya, dan industri lainnya, termasuk tidak terlaksananya dengan baik pelatihan/*vocational training* terhadap tenaga kerja informal oleh industri padat karya; (2) Tingkat pendidikan tenaga kerja indonesia (informal) mayoritas berpendidikan SD dan SMP kelas 2, sehingga begitu sulitnya dunia industri menyerap tenaga kerja/buruh disamping bergejolaknya kenaikan upah (UMP dan UMK) baik di provinsi, kabupaten/kota; (3) Terjadi perubahan penyerapan tenaga kerja dari industri padat karya menjadi industri padat modal sehingga tenaga kerja semakin berkurang oleh karena pemakaian mesin-mesin, baik di industri padat karya maupun industri padat modal (Tahun 2014); (4) Pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi terhadap tenaga kerja terampil mengalami hambatan akibat persyaratan yang ditetapkan oleh WTO dipersyaratkan tenaga kerja yang profesional dan MEA 2015 dipersyaratkan dengan jenjang pendidikan terendah adalah Diploma III setara dengan politeknik.

j. Perniagaan dan Industri

Masyarakat ekonomi ASEAN akan mulai diimplementasikan pada akhir Tahun 2015. Disamping menimbulkan implikasi berupa tantangan bagi industri dalam negeri karena persaingan di pasar domestik dan internasional yang lebih ketat, MEA 2015 juga membawa berkah berupa potensi akses pasar yang lebih luas bagi barang dan jasa dalam negeri. MEA sebenarnya bukan hanya berdimensi liberalisasi Peraturan Daerahgangan barang dan jasa melalui penciptaan pasar dan basis produksi tunggal di kawasan ASEAN, tetapi MEA juga bertujuan untuk mengembangkan ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi, memiliki pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian dunia.

Pada Tahun 2030 penduduk usia kerja Indonesia dapat diperkirakan mencapai 280 juta jiwa. Ini merupakan potensi besar yang dapat men-drive pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, profil demografi yang didominasi usia muda ini apabila tidak di-manage dengan baik juga akan menimbulkan permasalahan sosial tersendiri, khususnya ketika lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja.

Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kapasitas produksi untuk meningkatkan nilai investasi bagi perusahaan mendorong pengurangan tenaga manusia sebagai tenaga kerja. Hal ini berdampak terhadap minimnya penciptaan lapangan kerja baru. Kondisi politik baik di tingkat lokal maupun nasional yang tidak

kondusif cenderung berdampak turunnya minat investor dalam berinvestasi.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB nasional pada triwulan IV 2014 yaitu sebesar 21,28%. Akan tetapi, ekspor industri pengolahan non-migas tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, hilirisasi industri perlu terus didorong untuk meningkatkan daya saing industri nasional dengan meningkatkan ekspor dan membangun industri substitusi impor. Upaya hilirisasi industri melalui pengembangan kawasan industri berbasis bahan mineral masih memiliki beberapa kendala dalam aspek tata ruang, aspek perizinan, aspek teknis (ketersediaan bahan baku), dan aspek infrastruktur. Dalam hal ini, perlu adanya koordinasi kementerian/lembaga terkait untuk mendorong penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut.

Sementara itu, pengembangan *backbone industry* seperti industri baja dan industri petrokimia terkendala beberapa hal berikut: (1) Masih tingginya impor baja untuk memenuhi kebutuhan baja nasional, karena rendahnya tarif bea masuk impor di Indonesia serta tidak ada peningkatan kapasitas yang signifikan oleh produsen baja dalam negeri. Pada Tahun 2013, sebesar 8,4 juta ton atau 66% kebutuhan baja domestik (12,7 juta ton) dipenuhi oleh baja impor; (2) Turunnya harga baja global pun mempengaruhi pengembangan industri baja nasional, harga *Hot Rolled Coils* (HRC) mengalami penurunan yang cukup tajam dari USD 705 pada Tahun 2011 menjadi hanya USD 536 pada Q3 Tahun 2014. Permasalahan lainnya yaitu adanya *over-supply* baja produksi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mencapai 51 juta ton pada 2014; dan (3) Sulitnya mendapatkan kepastian bahan baku menjadi permasalahan dalam pengembangan industri petrokimia.

Dalam upaya pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya terdapat beberapa permasalahan, yaitu: (1) Belum adanya mekanisme pengaturan (*legal*) terkait insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat secara langsung diimplementasikan pada lokasi pengembangan kawasan industri; (2) Belum adanya kajian hasil inventarisasi potensi komoditi unggulan lokal non-mineral yang optimal sebagai basis potensi pengembangan yang bernilai ekonomi tinggi yang dapat secara langsung diserap dan dikembangkan dalam kawasan industri; (3) Belum adanya dukungan kebijakan yang optimal terkait kelembagaan dan operasional pengembangan Kawasan Peraturan Daerahgangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sebagai salah satu basis kawasan untuk peningkatan industri dan Peraturan Daerahgangan berorientasi pasar ekspor; dan (4) Belum adanya regulasi yang optimal yang dapat menjadi arahan dalam pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang Ekonomi, terutama KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

k. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- **Infrastruktur Sumber Daya Air**

Permasalahan pembangunan infrastruktur sumber daya air dari Tahun ke Tahun semakin meningkat yang ditandai dengan rendahnya kapasitas tampungan air per kapita per-tahun yang merupakan indikasi rentannya ketahanan air; menurunnya ketersediaan air sebagai dampak dari berkurangnya daerah tangkapan air; meningkatnya konflik pemanfaatan air sebagai dampak semakin menurunnya ketersediaan air; tingginya alih fungsi lahan sawah yang harus diimbangi dengan peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan; dan belum dimanfaatkannya potensi *hydropower* yang melimpah sebagai *green energy*. Di samping itu penggunaan air tanah secara berlebihan berdampak pada masalah lingkungan berupa penurunan muka air tanah, berkurangnya resapan air, dan penurunan permukaan tanah yang mengakibatkan semakin meluasnya daerah rawan banjir di musim penghujan.

- **Telematika dan Utilitas**

Pergeseran paradigma pembangunan ekonomi Indonesia dari berbasis pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) ke basis inovasi memerlukan ketersediaan infrastruktur telematika khususnya *broadband*. Dengan tingkat adopsi dan penetrasi penggunaan internet dan ponsel yang sedemikian masif, tentunya pembangunan ekonomi berbasis inovasi sangat mungkin untuk diwujudkan. Selain itu, konektivitas antar pulau yang belum sempurna menjadikan telematika salah satu solusi yang paling tepat untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Keberadaan peluang tersebut tentunya tidak lepas dari hambatan dan tantangan. Tingkat penetrasi Indonesia masih sangat tertinggal secara global, bahkan dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, ataupun Thailand. Keberadaan tulang punggung telekomunikasi khususnya kabel serat optik pun masih belum merata dan masih terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi khususnya diwilayah Indonesia bagian barat.

Sementara untuk bidang utilitas permasalahan utama masih ada di sektor persampahan, drainase dan air limbah. Ketiga sektor ini belum menjadi prioritas sehingga pendanaan untuk pembangunan sektor ini masih sangat jauh dari kebutuhan. Masalah utama persampahan adalah 99% Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah saat ini masih dioperasikan secara *open dumping* meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tenggat waktu terakhir bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan TPA di daerahnya menjadi TPA yang ramah lingkungan pada Tahun Tahun 2013 serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah. TPA *open dumping* ini

sangat membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar lokasi, mulai dari bahaya longsor, gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Sementara untuk drainase perkotaan permasalahan masih pada genangan dan banjir yang selalu terjadi setiap Tahunnya dengan peningkatan luas dan intensitasnya. Disamping itu belum ada pemisahan secara khusus antara saluran drainase air hujan dengan saluran air limbah sehingga terdapat tingkat pencemaran yang tinggi ke dalam badan air yang merusak persediaan air minum dan mengancam kesehatan masyarakat.

- **Transportasi**

Sistem transportasi yang handal adalah pilar utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sistem transportasi mempunyai fungsi untuk menghubungkan pusat produksi barang dan jasa dengan pusat distribusinya. Permasalahan utama bidang transportasi adalah masih terkonsentrasi pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia barat dan tengah khususnya di kota-kota besar sehingga di Indonesia bagian timur dan daerah perbatasan tingkat aksesibilitas dan konektivitasnya masih rendah. Di samping itu, masih ada kebijakan yang tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal. Kebijakan pemerintah daerah secara vertikal merupakan kewenangan pemerintah daerah terkait otonomi daerah sehingga ada kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpotensi bertabrakan. Oleh karena itu perlu sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemacetan dan kepadatan lalu lintas di kota – kota besar di Indonesia masih belum teruraikan secara baik. Penyediaan angkutan massal dengan kualitas yang laik juga masih minim sehingga belum dapat mendorong sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Selain itu terdapat masalah pembebasan lahan, belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi dan lemahnya penegakan hukum yang juga menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur transportasi.

- **Pertanahan dan Penataan Ruang**

Permasalahan di bidang Penataan Ruang antara lain belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang dalam skala besar; muatan substansi, muatan MP3EI, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) serta tingkat ketelitian peta antara RTRWN, RTRW Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; RTRW belum dijadikan sebagai acuan rencana pembangunan berbagai sektor; belum tersedianya indikator kinerja pelaksanaan penataan ruang baik di tingkat

pusat maupun daerah; belum tersedianya mekanisme Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam penyelesaian permasalahan sengketa dan konflik pemanfaatan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) serta masih terhambatnya percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

- **Pertanahan**

Kurangnya pemahaman stakeholder mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Alokasi pembiayaan untuk pembebasan tanah masing-masing sektor masih sangat terbatas. Mekanisme/proses pengadaan tanah yang membutuhkan waktu yang lama. Administrasi pertanahan di daerah yang masih lemah.

- **Perumahan**

Permasalahan bidang perumahan antara lain masih tingginya angka *backlog* perumahan, peningkatan harga rumah setiap Tahunnya sehingga semakin tidak terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sumber pembiayaan perumahan yang masih terbatas, lahan untuk perumahan yang terbatas, inovasi teknologi untuk perumahan masih terbatas, masih rendahnya keterlibatan pemerintah daerah untuk memenuhi ketersediaan perumahan di daerah masing - masing, terhambatnya proses pembahasan rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat karena belum adanya kesepakatan mengenai besaran jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat maupun pemerintah serta pemberi kerja khususnya pekerja di sektor swasta.

- **Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)**

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan KPS masih lemah. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat mengenai pelaksanaan KPS. Tingkat pemahaman pelaksanaan KPS sesuai dengan prosedur dan standar masih rendah. Dukungan pembiayaan pemerintah masih terbatas contohnya pembiayaan untuk *Project Development Fund* (PDF), transaksi, kontribusi pemerintah seperti *Viability Gap Fund* (VGF) dan *Availability Payment*. Kelembagaan yang khusus menangani pembangunan infrastruktur melalui skema KPS belum terstruktur/tersedia. Semua penanganan KPS masih bersifat *ad-hoc*, belum terlembaga baik di pusat maupun di daerah. Aturan dan pedoman yang lebih rinci dan secara sektoral sebagai acuan pelaksanaan proyek - proyek KPS belum tersedia. Contohnya mekanisme dan prosedur KPS sektor kesehatan, pendidikan,

perumahan, dan pariwisata. Terbatasnya tenaga ahli lokal yang kompeten untuk membantu penyiapan dan transaksi proyek KPS. Belum tersedianya pembiayaan pasar lokal (*domestic financing*) untuk pembiayaan proyek – proyek infrastruktur dan KPS.

I. Kerjasama Ekonomi Internasional

Sebagai negara berpenghasilan menengah (*Middle Income Country*), Indonesia secara bertahap harus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya ke tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak terjebak pada posisi *Middle Income Trap* (MIT) sehingga keinginan menjadi salah satu negara terkuat di bidang ekonomi dapat terwujud dimasa yang akan datang. Salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi internasional secara lebih luas baik dalam skema *Free Trade Agreement* (FTA) maupun *partnership* yang saat ini cukup banyak menjamur. Disadari bahwa *mindset* FTA bagi kebanyakan masyarakat Indonesia adalah negatif dan dianggap sebagai suatu ancaman, hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar, Indonesia dapat memilih skema-skema FTA yang dianggap tepat dan dapat menguntungkan Indonesia. Jadikan FTA sebagai peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk memperluas pergaulan global dan mengambil manfaat ekonomi yang seluas-luasnya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin global tersebut, Indonesia tidak perlu khawatir karena Indonesia memiliki potensi yang besar antara lain memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan total PDB yang cukup tinggi serta satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G 20. Disamping itu, jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia merupakan negara nomor 4 terbesar di dunia setelah China (1), India (2), dan Amerika Serikat (3). Dengan jumlah penduduk sebesar 248.818.100 jiwa, luas wilayah 1.860.360 km dan GDP 862.567.900 sudah selayaknya Indonesia mampu menjadi pemain di pasar global sekaligus menjadi pemenang di pasar ASEAN. Potensi Indonesia Indonesia tersebut masih ditopang dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang melimpah dan Sumber Daya Manusia yang potensial dengan usia produktif.

Dari berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, tentunya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Kelemahan utama Indonesia adalah terletak pada sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah serta pola pikir masyarakat dan pelaku usaha yang belum melihat secara keseluruhan potensi dan peluang serta manfaat yang dapat diraih dalam keterbukaan pasar global dan juga integrasi ekonomi ASEAN. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan berbagai kebijakan dan perbaikan regulasi yang mendukung

program-program penguatan di bidang-bidang yang strategis. Disamping itu, sinergitas antar Kementerian dan Lembaga terkait perlu dioptimalisasikan sehingga perumusan dan strategi yang dibuat sebagai modal untuk terjun di pasar global dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai perundingan di pasar internasional.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

Visi, Misi, Sembilan Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi sebagaimana tersebut dalam Buku I RPJMN 2015 -2019 serta kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima Tahun kedepan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengupayakan terwujudnya pembangunan nasional di bidang ekonomi dapat dicapai dengan optimal, maka Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

2.1 VISI

“Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mendukung Visi Presiden yakni ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan *responsibility* yang disingkat dengan “PIKIR”. Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima Tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitumerupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun makna kata efektif dan berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut. Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.

2.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah sebagai berikut:

"Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian"

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengupayakan/memastikan misi Presiden antara lain "*Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi , Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing*", yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasandari berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik danterlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal.

2.3 TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

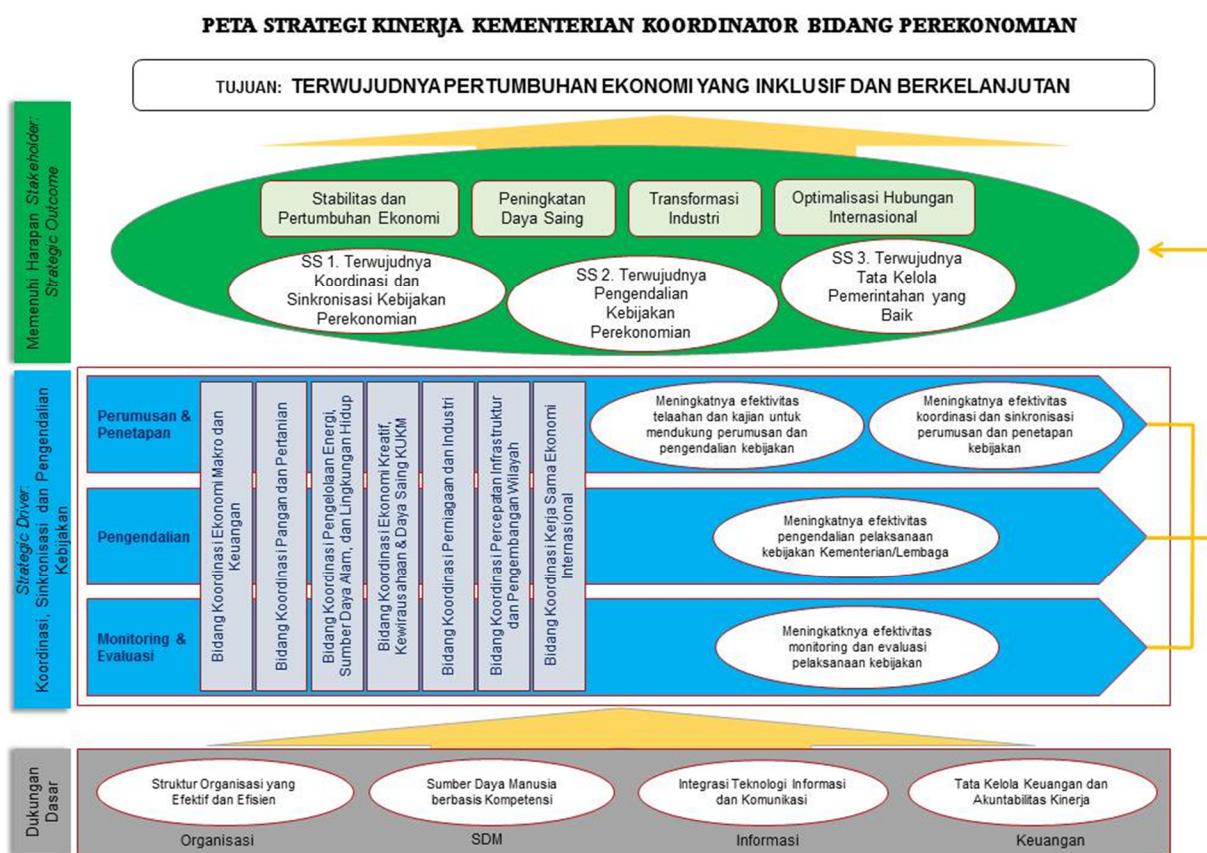
1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektordi bidang ekonomi mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal.Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang ekonomi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan dibidang perekonomian yang berwawasan lingkungan danpeningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran ekonomi, antara lain difokuskan pada target sasaran makro ekonomi, target sasaran kedaulatan pangan, target sasaran kedaulatan energi, target sasaran pembangunan infrastruktur dan target sasaran ketahanan air. Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan akan dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan (periode 2015-2019).

Berdasarkan visi, misi, tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut di atas, sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan (periode 2015-2019) dapat dilihat pada peta strategi (*strategy map*) organisasi. Visi, misi, tujuan, sasaran yang dituangkan dalam peta strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan organisasi yang dihadapi ke depan atau dalam periode 2015-2019, sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

Peta Strategi Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan indikator dan sasaran strategis.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mewujudkan tujuan 1 terkait dengan **"Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**, akan ditunjukkan dengan dan sasaran strategis 1 dan 2 sedangkan sasaran strategis 3 merupakan bagian dalam rangka mendukung terlaksananya penataan kebijakan perekonomian di tingkat Kementerian Teknis di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Sasaran strategis 3 ini untuk mewujudkan tujuan 2 yang berkaitan dengan **"Terwujudnya kinerja**

organisasi yang baik ". Untuk mengukur keberhasilan sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator	Target					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis (Outcome) 1: <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian						
Indikator <ul style="list-style-type: none">• %tase kebijakan baru bidang perekonomian yang terimplementasi	100	100	100	100	100	100
Sasaran Strategis (Outcome) 2: <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian						
Indikator <ul style="list-style-type: none">• %tase revisi kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi	100	100	100	100	100	100
Sasaran Strategis (Outcome) 3: <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
Indikator: <ul style="list-style-type: none">• Tingkat kinerja Manajemen Kementerian	4	4	4	4	4	4

Keberhasilan tercapainya Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian dengan target 4 tersebut, yang perhitungannya bersumber dari jumlah peraturan/keputusan Menteri Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian. Perbandingan antara target dan realiasi, dengan bobot 100, merupakan Nilai Tata Kelola untuk pengklasifikasi Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam upaya percepatan pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta kepribadian dalam budaya maka kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan nama "**NAWA CITA**". Sesuai dengan fungsi yang diamanatkan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan lebih fokus memastikan terwujudnya pelaksanaan agenda prioritas 3, 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

NAWACITA – 3 Agenda Prioritas di Bidang Ekonomi			
Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	
1. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.	1. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, 2. Membangun transportasi umum masal perkotaan, 3. Membangun perumahan dan kawasan permukiman, 4. Peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur, 5. Penguatan investasi, 6. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan, 7. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, 8. Akselerasi pertumbuhan	1. Peningkatan kedaulatan pangan, 2. Ketahanan air, 3. Kedaulatan energi, 4. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, 5. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, 6. Penguatan sektor keuangan, 7. Penguatan kapasitas fiskal bangsa	

	ekonomi nasional, 9. Pengembangan kapasitas Peraturan Daerahgangan nasional, 10. Peningkatan daya saing tenaga kerja	
--	--	--

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengembangkan tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional maupun program – program prioritas nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, dengan melalui strategi koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/kajian/telaahan dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target sektor/lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang madiri dan berdaya saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai. Adapun kebijakan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat;
2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi;
3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Pangan dan Pertanian;
4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Energi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas);
6. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Peraturan Daerahgangan;
7. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan UMKM berbasis Teknologi;
8. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;
9. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;
10. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor;
11. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas;
12. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan ASEAN Economic Community (AEC);
13. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan KEK.

Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan di bidang perekonomian, adalah sebagai berikut:

1. Mendahulukan penanganan terhadap prioritas kegiatan yang tercantum dalam Nawacita;
2. Mengedepankan kepentingan yang berdampak pada masyarakat luas dalam pengambilan keberpihakan dalam koordinasi dan sinkronisasi;
3. Mengantisipasi potensi deviasi atas realisasi kegiatan yang targetnya telah disepakati antar Kementerian/Lembaga.

Sebagi upaya mempercepat terwujudnya sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka program kerja ditekankan pada program lintas sektor sebagai berikut:

- 1) Program Lintas Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
 - a) Membangun penguatan keuangan berbasis nasional;
 - b) Penguatan investasi sumber domistik melalui kebijakan keuangan;
 - c) Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
- 2) Program Lintas Kerja Koordinasi Pangan dan Pertanian
 - a) Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan;
 - b) Pengembangan komoditi orientasi ekspor;
 - c) Koordinasi ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian;
 - d) Penanggulangan Kemiskinan Petani.
- 3) Program Lintas Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - a) Peningkatan Produktivitas Energi dan Percepatan Infrastruktur Energi;
 - b) Peningkatan Tata Kelola Industri Ekstraktif;
 - c) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihian Lingkungan hidup.
- 4) Program Lintas Koordinasi Peningkatan Daya Saing Nasional Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UKM serta Ketenagakerjaan.
 - a) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek;
 - b) Penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi ;
 - c) Peningkatan daya saing Koperasi dan UKM;
 - d) Penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, pemberdayaan buruh, dan perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi AEC 2015.
- 5) Program Lintas Koordinasi Bidang Perniagaan dan Industri
 - a) Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional;
 - b) Peningkatan Konektivitas Nasional;
 - c) Pengembangan Pasar Tradisional;
 - d) Pengembangan Investasi;
 - e) Pengembangan Sektor Industri dan Kawasan Industri.
- 6) Program Lintas Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - a) Penyediaan infrastruktur sumber daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi multimoda;

- b) Penyediaan perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis ekonomis;
 - c) Pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur.
- 7) Program Lintas Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
- a) Kerjasama Ekonomi Bilateral;
 - b) Kerjasama Ekonomi Multilateral ;
 - c) Kerjasama Ekonomi Regional.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Nasional/Kementerian guna mewujudkan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baik dalam jangka menengah/pendek, akan dilaksanakan dengan menggunakan dua Program yaitu Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.

a. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

Program koordinasi kebijakan bidang perekonomian ini merupakan kumpulan dari kegiatan unit eselon II pada unit kerja eselon I, yang terdiri dari sasaran kinerja, target kinerja, pendanaan dan indikator kinerja. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional/Kementerian dan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut. Unit kerja eselon I sesuai tugas dan fungsinya akan menetapkan keluaran-keluaran, antara lain berupa koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program kerja/kegiatan lintas sektor/sektor serta meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan (sosialisasi kebijakan). Keluaran-keluaran ini diyakini akan dapat mengupayakan meningkatnya pengelolaan program kerja/kegiatan sektor/lintas secara efektif dan efisien bagi kementerian/lembaga yang dikoordinasikan (sebagai pelanggan). Keberhasilan kinerja unit kerja eselon I yang berupa sasaran program yang disebut juga hasil (*outcome*) akan diukur dengan indikator kinerja. Adapun kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai oleh unit eselon I, adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
	2015	2016	2017	2018	2019	
<u>Sasaran Program (Outcome) 1</u> Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan						D1
<u>Indikator:</u> <ul style="list-style-type: none"> • %tase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan 	80%	80%	85%	85%	90%	

<u>Sasaran Program (Outcome) 2</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan						
<u>Indikator:</u> • %tase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan	80%	80%	85%	85%	90%	D1
<u>Sasaran Program (Outcome) 3</u> • Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).						
<u>Indikator:</u> • Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat/KUR (dalam rupiah)	20 T	25 T	30 T	35 T	40 T	
<u>Sasaran Program (Outcome) 4</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pangan dan Pertanian						D2
<u>Indikator:</u> • %tase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian yang diselesaikan	100	100	100	100	100	
<u>Sasaran Program (Outcome) 5</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian						
<u>Indikator:</u> • %tase Kebijakan Bidang Pangan dan Pertanian yang terimplementasi	100	100	100	100	100	
<u>Sasaran Program (Outcome) 6</u> • Terwujudnya efektivitas tata kelola pangan dan pertanian yang baik						
<u>Indikator:</u> • %tase partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan pertanian	90	90	90	90	90	

Sasaran Program (Outcome) 7						D3
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 						
Indikator:	100	100	100	100	100	D3
<ul style="list-style-type: none"> %tase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan 						
Sasaran Program (Outcome) 8						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 						
Indikator:	100	100	100	100	100	
<ul style="list-style-type: none"> %tase Kebijakan Bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang terimplementasi 						
Sasaran Program (Outcome) 9						
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 						
Indikator:	90	90	90	90	90	
<ul style="list-style-type: none"> %tase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI 						
Sasaran Program (Outcome)10						D4
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 						
Indikator:	85	85	85	85	85	
<ul style="list-style-type: none"> %tase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan 						

<u>Sasaran Program (Outcome) 11</u>						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 						
<u>Indikator:</u>	85	85	85	85	85	D4
<ul style="list-style-type: none"> %tase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan 						
<u>Sasaran Program (Outcome) 12</u>						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, KUKM, SDM, dan ketenagakerjaan/buruh dalam pelaksanaan MEA 2015. 						
<u>Indikator:</u>	85	85	85	85	85	
<ul style="list-style-type: none"> %tase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015. 						
<u>Sasaran Program (Outcome) 13</u>						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (<i>engineering services, architectural, accountancy services</i>) dalam pelaksanaan MEA 2015. 						
<u>Indikator:</u>	85	85	85	85	85	
<ul style="list-style-type: none"> %tase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/internasional terhadap SDM, ketenagakerja-an/buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan <i>market share</i> di ASEAN 						
<u>Sasaran Program (Outcome) 14</u>						D5
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 						

Perniagaan dan Industri						
Indikator: <ul style="list-style-type: none">• %tase rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.	85	85	85	85	85	
Sasaran Program (Outcome) 15 <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri						D5
Indikator: <ul style="list-style-type: none">• %tase kebijakan bidang perniagaan dan Industri yang terimplementasi.	85	85	85	85	85	
Sasaran Program (Outcome) 16 <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional						
Indikator: <ul style="list-style-type: none">• %tase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi	85	85	85	85	85	
Sasaran Program (Outcome) 17 <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						D6
Indikator: <ul style="list-style-type: none">• Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	4	4	4	4	4	
Sasaran Program (Outcome) 18 <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						
Indikator: <ul style="list-style-type: none">• %tase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan	80	80	80	80	85	
Sasaran Program (Outcome) 19 <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi						

baru di luar pulau Jawa						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) diluar pulau Jawa 	4	3	7	3	3	
Sasaran Program (Outcome) 20						D6
<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan 						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPERATURAN PEMERINTAHIP) 	6	7	10	12	13	
Sasaran Program (Outcome) 21						D7
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional. 						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> %tase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan 	85	85	85	85	85	
<ul style="list-style-type: none"> Presentase (%) rekomendasi penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA. 	75	75	75	75	75	
Sasaran Program (Outcome) 22						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional. 						
Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> %tase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti 	85	85	85	85	85	
<ul style="list-style-type: none"> %tase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti. 	85	85	85	85	85	
Sasaran Program (Outcome) 23						
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Internasional. 						

Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> • %tase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional 	85	85	85	85	85	

b. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Kementerian Koordinator dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan teknis melalui peningkatan pelayanan unit kerja dan memantapkan penyelenggaraan organisasi yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berkomitmen yang tinggi maupun pengendalian dan pengawasan yang kuat. Program ini merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran program. Kinerja program/kegiatan ini akan diukur dengan indikator kinerja. Adapun kinerja progam/kegiatan yang berupa hasil/keluaran dan indikator kinerja serta targetnya adalah sebagai berikut:

Sasaran Program Indikator kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Program (Outcome)1						Setmenko
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Meningkatnya budaya kerja organisasi berbasis kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik</u> 						
Indikator	90	90	90	90	90	
<ul style="list-style-type: none"> • %tase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian 	3	3	3	3	3	
<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan layanan kesekretariatan dan pengawasan 	80	90	90	90	90	
<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi laporan keuangan tetap wajar tanpa pengecualian 	100	100	100	100	100	
<ul style="list-style-type: none"> • %tase Sumber daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi 	75	90	90	90	90	
Sasaran Program (Outcome)2						
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai</u> 						

Sasaran Program Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
	2015	2016	2017	2018	2019	
Indikator: • %tase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	100	100	100	100	100	

3.3 Kerangka Regulasi

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha. Selain reformasi regulasi, pembangunan ekonomi tergantung pada pengembangan birokrasi yang lebih efektif yang didukung oleh kementerian lembaga yang kokoh. Negara memiliki peranan utama dalam memfasilitasi kesuksesan model kerjasama pemerintah dan swasta, menghapus rintangan regulasi dan administrasi dalam pembentukan sektor baru dan memfasilitasi keikutsertaan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang ada dalam ekonomi formal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersifat sebagai koordinator dalam penyusunan regulasi untuk menghindari tumpang tindihnya regulasi yang ditetapkan oleh sektor dan memastikan kebijakan yang telah diputuskan diakomodir dalam suatu regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka antisipasi penyesuaian terhadap perubahan lingkungan organisasi yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka setiap organisasi khususnya birokrasi pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengelolaan sumber daya organisasi harus dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka mewujudkan:

- 1). Organisasi yang bersih dan akuntabel;
- 2). Peningkatan efektifitas koordinasi ;
- 3). Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Permasalahan dan tantangan di bidang perekonomian nasional yang kompleks saat ini dapat ditangani dengan lebih baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah yang terkait mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian

yang diselenggarakan oleh satu kementerian institusi kementerian koordinator dalam jajaran pemerintah atau kabinet. Dalam hal inilah peran penting tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menunjukkan besarnya kepercayaan instansi pemangku Kepentingan /*stakeholders* atas peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai lembaga koordinasi yang strategis dalam penyelengaraan kebijakan pemerintahan di bidang perekonomian. Peran ini merupakan salah satu faktor penting yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan stabilitas dan kondisi membaiknya perekonomian Indonesia. Keberhasilan menciptakan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian yang harmonis, diwujudkan dalam kegiatan penting yang sering dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu melalui rapat-rapat koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kalangan dunia usaha terkait.

Dalam menghadapi situasi permasalahan di bidang perekonomian nasional yang senantiasa berkembang dan cepat berubah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dituntut untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah lintas kementerian/lembaga. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul lintas sektoral dapat segera dikelola dengan baik.

Organisasi yang mampu bertahan di masa depan adalah organisasi yang melakukan proses pembelajaran (*learning*) dengan baik. Dalam proses pembelajaran organisasi perlu mengevaluasi berbagai aspek dalam kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu meningkatkan kapasitas kinerja sumber daya sumber daya manusia aparatur sesuai dengan nilai-nilai kementerian.

Dalam rangka implementasi nilai-nilai kementerian, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai-nilai Kementerian yang dirumuskan terdiri dari 5 (lima) nilai dasar yaitu Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan *Responsibility* (PIKIR). Nilai-nilai Kementerian akan terus menjadi landasan bertindak dan pemicu dalam upaya peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya organisasi. Dengan implementasi nilai-nilai

kementerian akan menjadi dasar perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*).

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiandiarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan. Upaya untuk mebentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dalam menjalankan tugas operasional organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi akan dapat berjalan dengan lancar, bila mendapat dukungan sarana dan prasarana sebagai infrastruktur kerja yang memadai.

Penataan organisasi dan tata kerja yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2015. Terdapat perubahan mendasar di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 dalam hal tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

- a. Pasal 2, disebutkan bahwa: "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian".
- b. Pasal 3, huruf b. "pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian"

Dalam rangka membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi organisasi sesuai perubahan lingkungan strategis agar diperoleh keseimbangan beban kerja yang proporsional antara tugas dan fungsi, jabatan struktural dan *output* yang dihasilkan. Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) diperlukan sebagai masukan untuk evaluasi dan penataan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Dengan berpendoman pada nilai kementerian "profesional", maka kegiatan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur sesuai dengan yang telah terimplementasi yaitu kebijakan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Struktural Eselon I, dan diteruskan pada Jabatan Struktural Eselon II. Sedangkan promosi jabatan terbuka Eselon III dan Eselon IV telah dilakukan sebelumnya dan menghasilkan para pejabat yang lebih profesional.

Terkait dengan penataan tata laksana dilakukan melalui kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembangunan atau pengembangan *e-government*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijabarkan ke dalam SOP. Perilaku yang berkembang menunjukkan bahwa orang bekerja sudah mulai menggunakan SOP sebagai acuan dan melakukan audit SOP karena temuan-temuan yang tidak cocok dengan SOP-nya. Dari aspek pengembangan *e-government*, inovasi dan dukungan sistem informasi selalu terus dikembangkan dan infrastruktur informasi yang ada telah cukup memadai. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan yaitu melalui upaya pengembangan *e-government*, antara lain berupa *dashboard* sistem informasi perekonomian, intranet, website, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi pinjaman luar negeri, aplikasi persuratan yang terintegrasi dengan aplikasi arsip ANRI.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan tata laksana kedepan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses bisnis;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses bisnis;
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*; dan
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan tugas dan fungsi organisasi bersifat manajerial yaitu memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional dengan pendekatan peningkatan pengelolaan program kerja/kegiatan sektor/lintas sektor secara efektif dan efisien. Melalui peningkatan pengelolaan tersebut target sasaran kinerja

sektor/lintas sektor yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dapat dicapai. Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diwujudkan dari sasaran strategis yang disebut juga dengan nama *outcome* kementerian (dampak). Kinerja dampak (*outcome*) Kementerian merupakan cerminan dari berfungsinya kinerja - kinerja program unit eselon I (hasil/*Outcome*) yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang ekonomi secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada kementerian/lembaga di bidang ekonomi, sehingga memacu aktivitas kementerian/lembaga tersebut, yang pada akhirnya mendorong peningkatan produktivitas sektor/lintas sektor. Oleh karena itu, keluaran (rekomendasi) yang ditetapkan unit eselon I tersebut merupakan identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah keluaran maupun jenis keluarannya. Untuk mewujudkan keluaran (*output*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran. Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dengan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional yang diilustrasikan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Dalam pengalokasian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, outcome, output hingga komponen. Perhitungan prediksi berdasarkan asumsi kegiatan rutinitas/tetap selama waktu 4 Tahun kedepan (*base line budget*) dengan memperhitungkan asumsi inflasi serta dengan menggunakan Tahun anggaran berjalan sebagai indeksnya. Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran Tahunan yang bersifat indikatif. Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 pada Matriks Pendanaan dan Target.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) Tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2015-2019, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan Tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan harapan dapat mendukung secara optimal terhadap upaya pencapaian rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir Tahun anggaran. Apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan.

Dengan tersusunnya Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memaksimalkan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DARMIN NASUTION

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015.	85	85	85	85	85						
<u>Sasaran Program (Outcome) 13:</u> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan 8 MRA yang sesuai dengan pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (<i>engineering services, architectural, accountancy services</i>) dalam pelaksanaan MEA 2015. 											DIV
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan <i>market share</i> di negara-negara ASEAN	85	85	85	85	85						
<u>Sasaran Program (Outcome) 14:</u> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri 											DV

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.	85	85	85	85	85					
<u>Sasaran Program (Outcome) 15:</u> • Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri										DV
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase kebijakan bidang perniagaan dan Industri yang terimplementasi.	85	85	85	85	85					
<u>Sasaran Program (Outcome) 16:</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional										DV
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi	85	85	85	85	85					
<u>Sasaran Program (Outcome) 17:</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah										DVI
<u>Indikator:</u> ➤ Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	4	4	4	4	4					

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang terselesaikan	85	85	85	85	85					
➤ Persentase (%) rekomendasi penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA.	75	75	75	75	75					
<u>Sasaran Program (Outcome) 22:</u> • Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional.										DVII
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti	85	85	85	85	85					
➤ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti.	85	85	85	85	85					
<u>Sasaran Program (Outcome)23:</u> • Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil- hasil Kerjasama Ekonomi Internasional.										DVII
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional	85	85	85	85	85					

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kebijakan remitansi, pembiayaan dan asuransi TKI yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80					
2. Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal						2.000	2.300	2.415	2.537	2.663
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal yang ditindaklanjuti	75	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase hasil dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi	80	80	80	80	80					

3. Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN						2.000	2.000	2.100	2.205	2.315	Asdep BUMN
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80						
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti	75	80	80	80	80						
4. Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan						3.000	3.000	3.150	3.309	3.474	Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80						

<u>Indikator:</u> ➤ Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah	80	80	80	80	80					
6. <u>Koordinasi Kebijakan Pangan (N)</u>						2.700	2.900	3.000	3.200	3.400
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan yang diselesaikan	85	100	100	100	100					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pangan										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase kebijakan bidang pangan yang terimplementasikan	85	100	100	100	100					
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian										
<u>Indikator:</u> ➤ Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan	12	12	12	12	12					

dan Pertanian										
7. <u>Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura (N)</u>						2.300	2.200	2.600	2.700	Asdep Perkebunan dan Hortikultura
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura										
Indikator: ➤ Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diselesaikan	85	100	100	100	100					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan perkebunan dan hortikultura										
Indikator: ➤ Persentase kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura yang terimplementasikan	85	100	100	100	100					
8. <u>Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan</u>						2.300	2.100	2.400	2.500	Asdep Peternakan dan Perikanan
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peternakan dan perikanan										
Indikator: ➤ Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peternakan dan perikanan yang diselesaikan	85	100	100	100	100					

Sasaran kegiatan (<i>output</i>) 2 • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan peternakan dan perikanan										
Indikator: ➤ Persentase kebijakan bidang peternakan dan perikanan yang terimplementasikan	85	100	100	100	100					
9. <u>Koordinasi kebijakan bidang pengembangan prasarana, sarana pangan, dan sumber daya hayati</u>						2.100	2.100	2.200	2.300	Asdep Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
Sasaran kegiatan (<i>output</i>) 1 • Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian										
Indikator: ➤ Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian yang diselesaikan	85	100	100	100	100					
Sasaran kegiatan (<i>output</i>) 2 • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian										
Indikator: ➤ Persentase kebijakan bidang prasarana, sarana pangan dan pertanian yang terimplementasikan	85	100	100	100	100					

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang industri ekstraktif	75	100	100	100	100					
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru extractive Industries Transparency Initiative (EITI)										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI	-	90	90	90	90					
13. Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup						2.000	2.200	2.340	2.580	Asdep Pelestarian Lingkungan Hidup
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Pelestarian Lingkungan Hidup										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi kebijakan dibidang pelestarian lingkungan hidup yang terimplementasi	75	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang Pelestarian Lingkungan Hidup										
➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup	75	100	100	100	100					

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase kebijakan bidang agribisnis yang terimplementasikan	75	100	100	100	100					
17. <u>Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM</u>						2.000	2.000	2.100	2.200	2.320
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronosasi kebijakan Pengembangan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselesaikan	85	85	85	85	85					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	90	90	90	90	90					

<u>Indikator:</u> ➤ Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUkm	12	12	12	12	12					
18. <u>Koordinasi Kebijakan.</u> <u>Bidang Pengembangan Kewirausahaan</u>						2.000	2.000	2.100	2.200	2.320
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan										Asdep Pengembangan Kewirausahaan
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan yang diselesaikan	85	85	85	85	85					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Pengembangan Kewirausahaan	85	85	85	85	85					
19. <u>Koordinasi Kebijakan</u> <u>Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan</u>						2.000	2.000	2.100	2.200	2.320
										Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronosasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan yang diselesaikan	85	85	85	85	85					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan	85	85	85	85	85					
20. <u>Koordinasi kebijakan bidang ketenagakerjaan</u>						2.000	2.000	2.100	2.200	Asdep Ketenagakerjaan
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketenagakerjaan										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketenagakerjaan yang diselesaikan	85	85	85	85	85					

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti	75	100	100	100	100					
22. <u>Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi (B)</u>						2.000	1.500	1.580	1.650	1.740
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi										Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM BerbasisTeknologi yang diselesaikan	80	85	85	85	85					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM BerbasisTeknologi	75	85	85	85	85					

23. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional						5.500	4.500	4.950	5.445	5.990	Asdep Pengembangan Logistik Nasional
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional yang ditindaklajuti	80	100	100	100	100						
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional yang ditindaklanjuti	75	100	100	100	100						
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing logistik nasional											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing logistik nasional yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100						

24. Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional						2.000	2.000	2.200	2.420	2.663	Asdep Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional											
Indikator: ➤ Persentase rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional yang ditindaklanjuti	80	100	100	100	100						
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional											
Indikator: ➤ Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional yang ditindaklanjuti	75	100	100	100	100						
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Ekspor											
Indikator: ➤ Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Ekspor yg ditindaklanjuti	100	100	100	100	100						

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100					
27. <u>Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri</u>						2.000	2.000	2.200	2.421	2.662
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan industri										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan industri yang ditindaklajuti	80	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan investasi										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan industri yang ditindaklanjuti	75	100	100	100	100					
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing industri										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing industri yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100					

<u>Indikator:</u> ➤ Jumlah rekomendasi pengendalian pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi yang ditindaklanjuti	8	8	8	8	9					
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya Pemahaman Peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi	80	80	80	80	80					
30 <u>Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia</u>						14.500	13.000	15.000	16.500	18.000
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80					

<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Proyek-Proyek P3EI										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Proyek - Proyek Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya Pemahaman Peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap materi Sosialisasi/desiminasi Kebijakan Proyek - Proyek Infrastruktur dan Kawasan Strategis yang diprioritaskan	80	80	80	80	80					
31 <u>Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air</u>						7.500	7.500	8.250	9.075	9.982
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti	85	85	85	90	90					

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80						
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Tersusunnya Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, & Pembiayaan Infrastruktur											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80						
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya Pemahaman Peserta terhadap Materi sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur	80	80	80	80	80						
33 <u>Koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas</u>						56.406,5	48.284,6	55.000,0	65.000,0	80.000	Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur

	<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	0	80	80	80	80					
34	<u>Koordinasi kebijakan bidang telematika dan utilitas</u>						3.900	3.900	4.200	4.500	4.900
	<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Telematika dan Utilitas										Asdep Telematika dan Utilitas
	<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) rekomendasi kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80					
	<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Tersusunnya Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Telematika dan Utilitas										
	<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80					
35	<u>Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik</u>						2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Tercapainya kesepakatan kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik										Asdep Kerjasama Ekonomi Amerika & Pasifik

<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang terselesaikan	85	80	80	80	80						
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Tersusunnya Rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80						
➤ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80						
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya Pemahaman Peserta atas materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik	85	80	80	80	80						
36 <u>Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (B)</u>						2.700	2.400	2.850	3.400	3.900	Asdep Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Tercapainya kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan	85	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Tersusunnya pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti ➤ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya pemahaman atas Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	85	80	80	80	80					

37	Koordinasi Kebijakan <u>Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional (N)</u>					2.500	2.200	2.420	2.670	3.000	Asdep Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional
	<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Tercapainya kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional										
	<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang terselesaikan	85	85	85	85	85					
	➤ Persentase (%) rekomendasi Penguatan Daya Saing Nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA	85	80	80	80	80					
	<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Tersusunnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional										
	<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang ditindaklanjuti	85	85	85	85	85					
	➤ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang ditindaklanjuti	85	85	85	85	85					

<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional 										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional	85	80	80	80	80					
38 <u>Koordinasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Asia</u>						2.700	3.000	3.270	3.650	Asdep Kerjasama Ekonomi Asia
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia yang terselesaikan 										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Asia yang terselesaikan	85	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> <ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Asia 										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti ➤ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80					
	85	80	80	80	80					

<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Asia										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Asia	85	80	80	80	80					
<u>Sasaran kegiatan (output) 4</u> • Terwujudnya Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional										
<u>Indikator:</u> ➤ Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional	12	12	12	12	12					
39 <u>Koordinasi Kebijakan bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan</u>						2.000	2.000	2.200	2.425	2.670
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Tercapainya kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan										
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang terselesaikan	85	80	80	80	80					

<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> <ul style="list-style-type: none">• Tersusunnya Rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan											
<u>Indikator:</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80						
<ul style="list-style-type: none">➤ Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti	85	80	80	80	80						
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> <ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya Pemahaman Peserta atas materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan											
<u>Indikator:</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan	85	80	80	80	80						

40 <u>Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</u>						11.313	11.100	20.360	25.135	30.910	Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Koordinasi Penyelesaian peraturan pelaksana UU No 39 Tahun 2009											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang KEK	75	80	80	80	80						
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Pembentukan dan Pengembangan KEK											
<u>Indikator:</u> ➤ Jumlah penetapan KEK baru	2	2	7	2	1						
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Penguatan Kapasitas kelembagaan penyelenggaraan KEK											
<u>Indikator:</u> ➤ Persentase pemahaman penyelenggara KEK	80	80	80	80	80						
<u>Sasaran kegiatan (output) 4</u> • Dukungan administrasi dan manajemen											
<u>Indikator:</u> ➤ Terselenggaranya Layanan Perkantoran	12	12	12	12	12						

Program/kegiatan Sasaran Program/sasaran kegiatan Indikator kinerja	Target					Alokasi dalam juta rupiah					Unit Organisasi Pelaksana
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						130.499,4	120.130,5	131.603,0	144.116,0	158.829,0	
Sasaran Program (<i>Outcome</i>)1 Meningkatnya budaya kerja organisasi berbasis kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik											Setmenko
Indikator											
• Persentase kepatuhan terhadap ketentuan dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian	90	90	90	90	90						
• Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	3	3	3	3	3						
• Persentase penggunaan aplikasi dibidang kesekretariatan	80	90	90	90	90						
• Kualifikasi laporan keuangan tetap wajar tanpa pengecualian	100	100	100	100	100						
• Persentase Sumber daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi	75	90	90	90	90						

<u>Sasaran Program (Outcome)2</u> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai <u>Indikator:</u> <ul style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai 	100	100	100	100	100					
1. <u>Peningkatan Pelayanan Perencanaan</u>						5.150	4.500	4.730	4.960	Biro Perencanaan
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 										
<u>Indikator:</u> ➢ Jumlah laporan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian	4	4	4	4	4					
2. <u>Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas</u>						9.150	7.500	8.080	8.650	Biro Hukum, Persidangan dan Humas
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> <ul style="list-style-type: none"> Tercapainya penyampaian informasi publik kepada stakeholder terkait dengan kementerian koordinator bidang perekonomian 										
<u>Indikator:</u> ➢ Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian	2	2	2	2	2					

<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat pimpinan di lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian											
<u>Indikator:</u> ➤ Jumlah laporan kegiatan persidangan kementerian koordinator bidang perekonomian	1	1	1	1	1						
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terselenggaranya dukungan kegiatan menteri koordinator bidang perekonomian dan fasilitasi penyiapan naskah menteri yang efektif dan efisien											
<u>Indikator:</u> ➤ Jumlah laporan dukungan kegiatan menko perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri	1	1	1	1	1						
<u>Sasaran kegiatan (output) 4</u> • Tersusunnya peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan surat keputusan di lingkungan kementerian bidang perekonomian											
<u>Indikator:</u> ➤ Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan, serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	3	3	3	3	3						

3. Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum						113.099	105.030,4	115.533,0	127.086,0	139.799,0	Biro Umum
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u> • Terselenggaranya layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia											
Indikator: ➤ Pelaksanaan administrasi Umum Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan penempatan sumber daya manusia	12	12	12	12	12						
<u>Sasaran kegiatan (output) 2</u> • Terselenggaranya layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan											
Indikator: ➤ Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perpendaharaan, dan pelaksanaan/ verifikasi dokumen anggaran	3	3	3	3	3						
<u>Sasaran kegiatan (output) 3</u> • Terselenggaranya layanan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara											
Indikator: ➤ Jumlah bulan pengelolaan Barang Milik Negara	12	12	12	12	12						

Indikator:	4	4	4	4	4						
➤ Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan											
➤ Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	3	3	3	3	3						
5. <u>Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian</u>						2.500	2.500	2.630	2.760	2.890	Staf Ahli
<u>Sasaran kegiatan (output) 1</u>											
• Terwujudnya laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian											
Indikator:	5	5	5	5	5						
➤ Jumlah laporan hasil telaahan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian											

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
 Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
 NIP 197109011996031001

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 DARMIN NASUTION